

## ABSTRAK

Pembentukan tim Transformasi Reformasi Polri pada tahun 2025 merupakan respon institusional terhadap krisis kepercayaan publik dan tuntutan Reformasi Kepolisian, namun memunculkan kritik dari masyarakat sipil karena dinilai belum mengakomodasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data dari wawancara, dokumen publik, pernyataan organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian, dan pemberitaan media terkait pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri Periode 2020-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Ruang Publik dan Kritik Sosial dari Jurgen Habermas, Teori Reformasi Kepolisian dan Sektor Keamanan Publik dari David H. Bayley, serta konsep Civil Society dari Larry Diamond untuk menganalisis relasi antara negara, Kepolisian, dan masyarakat sipil. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat sipil memandang Tim Transformasi Reformasi Polri masih didominasi pendekatan internal dan administratif, belum menghadirkan mekanisme pengawasan eksternal yang independen, serta belum menjawab persoalan mendasar seperti impunitas, politisasi kepolisian, dan lemahnya akuntabilitas institusi. Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri belum dapat dianggap sebagai reformasi yang substantif karena keterlibatan masyarakat sipil masih terbatas dan desain reformasinya belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip kepolisian demokratis, transparansi, serta akuntabilitas publik. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan pandangan pentingnya transformasi kebijakan reformasi kepolisian yang lebih inklusif melalui penguatan mekanisme pengawasan eksternal, pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan, dan pembangunan model reformasi Polri yang berbasis demokrasi, hak asasi manusia, serta partisipasi publik.

**Kata Kunci:** Tim Transformasi Reformasi Polri; Reformasi Kepolisian; Masyarakat Sipil; Akuntabilitas Kepolisian; Kepolisian Demokratis; Ruang Publik.

## ABSTRACT

*The establishment of the National Police Transformation and Reform Team for the 2020–2025 period was an institutional response to a crisis of public trust and demands for police reform; however, it drew criticism from civil society for failing to substantively incorporate principles of transparency, accountability, and public participation. This study employs a qualitative descriptive approach, utilizing data from interviews, public documents, civil society organization statements, research findings, and media reports regarding the team's formation. It analyzes the relationships between the state, the police, and civil society through the lenses of Jürgen Habermas's theories on the public sphere and social critique, David H. Bayley's theories on police and public security sector reform, and Larry Diamond's concept of civil society. The findings indicate that civil society perceives the team as being dominated by internal and administrative approaches; it lacks independent external oversight mechanisms and fails to address fundamental issues such as impunity, the politicization of the police, and weak institutional accountability. The team's establishment cannot be considered substantive reform, as civil society involvement remains limited and the design does not fully prioritize principles of democratic policing, transparency, and public accountability. This study contributes by highlighting the importance of a more inclusive transformation of police policy achieved through strengthened external oversight, civil society engagement in policy formulation, and the development of a police reform model grounded in democracy, human rights, and public participation.*

**Keywords:** *National Police Transformation and Reform Team; Police Reform; Civil Society; Police Accountability; Democratic Policing; Public Sphere.*